

11 - 20 Januari 2024

KLIPING DIGITAL



Tema: Perpustakaan, Palembang,
Islam dan Melayu



www.perpustakaan.radenfatah.ac.id

2024
UPT Perpustakaan
UIN Raden Fatah Palembang

daftar isi

- TINJAU ULANG KONTRAK LAYANAN DENGAN MASYARIK
- MERAWAT TRADISI ADILUHUNG DHAUP AGENG PAKUALAM
- KEPPRES BPIH SUDAH DITEKEN PRESIDEN
- BIAYA HAJI 2024 DITETAPKAN
- 3 WARISAN BUDAYA TUNGGU SIDANG UNESCO 2024
- TABUNGAN HAJI: BANK BIDIK TABUNGAN HAJI NAIK
- CLIMATE FINANCE: STRETCHING THE LIMITS OF ISLAMIC FINANCE
- BARU ADA 4.438 JEMAAH HAJI SUDAH LUNASI BIPIH
- KUOTA HAJI INDONESIA BERPOTENSI NAIK 2 KALI LIPAT
- MUHAMMADIYAH TETAPKAN 1 RAMADAN 1455 PADA 11 MARET

Daftar Nama Jemaah Haji 2024

- Sudah diterbitkan dalam bentuk surat edaran.
- Dapat diakses melalui aplikasi *Pusaka Superapps* Kementerian Agama.
- Para jemaah yang ada dalam daftar dapat mempersiapkan proses pelunasan biaya haji.



Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih)

Bipih yang harus dibayar jemaah bergantung pada embarkasi keberangkatan.

Embarkasi Bipih Tertinggi ➤ Surabaya: Rp60,5 juta

Embarkasi Bipih Terendah ➤ Aceh: Rp49,9 juta

Masa Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Jemaah Reguler

Dibagi dua tahap

- Tahap I: 9 Januari–7 Februari 2024
- Tahap II: 20 Februari–Maret 2024

Kriteria Jemaah Haji Reguler yang Melakukan Pelunasan Tahap I

- Jemaah haji reguler sesuai dengan nomor urut porsi keberangkatan 1445 H/2024 M.
- Jemaah haji reguler yang masuk prioritas lanjut usia.
- Jemaah haji reguler yang masuk urutan nomor porsi cadangan.

Sumber: Kemenag/Libang MI

Tinjau Ulang Kontrak Layanan dengan Masyarakat

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) diingatkan untuk mempertimbangkan secara matang bila hendak mempertahankan kerja sama dengan *masyarakat*, perusahaan penyedia layanan bagi jemaah haji Indonesia tahun lalu.

“Karena penyediaan layanan jemaah dari katering, transportasi, konsumsi, akomodasi itu menggunakan jasa mereka, terbukti bahwa pelayanannya itu sangat mengecewakan,” tutur Ketua Komnas Haji dan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Mustolih Siradj, saat dihubungi, kemarin.

Mustolih mencontohkan kejadian ketika ribuan jemaah haji terlambat diangkut dari Musdalifah ke Mina, sedangkan mereka juga tidak mendapatkan makanan dan minuman di Musdalifah. Akibatnya, banyak jemaah haji mengalami kelelahan yang luar biasa.

“Bahkan ini disinyalir menjadi pemicu banyaknya jemaah haji yang kemudian wafat ketika menunaikan lempar jumrah,” ujar Mustolih.

Di samping itu, kata Mustolih, skrining kesehatan harus diperketat seperti yang direncanakan Kemenag untuk memastikan jemaah haji benar-benar mampu secara fisik melaksanakan ibadah haji.

Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2024 mengenai penetapan nominal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1445 Hijriah/2024

Masehi untuk setiap embarkasi atau tempat pemberangkatan.

Embarkasi tersebut meliputi Aceh, Medan, Batam, Padang, Palembang, Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi), Surakarta, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Lombok, dan Kertajati.

Nominal biaya haji tertinggi tercatat di embarkasi Surabaya dengan BPIH sebesar Rp97,8 juta. Dari jumlah tersebut, nominal biaya perjalanan ibadah haji (bipih) yang dibebankan langsung kepada jemaah haji sebesar Rp60,5 juta dan sisanya ditanggung dana nilai manfaat.

Kemudian, nominal biaya haji terendah tercatat di embarkasi Aceh dengan BPIH sebesar Rp87,3 juta dan bipih yang harus dilunasi sebesar Rp49,99 juta. Bipih yang dibayarkan jemaah haji digunakan untuk biaya penerbangan haji, biaya hidup, serta sebagian biaya layanan di Arafah, Musdalifah, dan Mina.

DiTjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag juga telah merilis daftar nama jemaah haji reguler yang masuk alokasi kuota haji 2024 yang totalnya sebanyak 241 ribu. Para jemaah calon haji diminta bersiap melakukan pelunasan.

“Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. *Istita'ah* (mampu) kesehatan haji mulai tahun ini menjadi syarat pelunasan,” ujar Anna. (Iam/Dev/X-10)

Merawat Tradisi Adiluhung Dhaup Ageng Pakualaman

SEBANYAK tujuh putri dengan gerakan anggun menari *Bedhaya Sidamukti* dengan iringan gendang gamelan di Bangsal Sewandana, Pura Pakualaman, Rabu (10/1). Beksan itu dibuat khusus dalam rangka pernikahan putra kedua KGPAА Paku Alam X, BPH Kusumo Kuntunugroho, dengan Laily Annisa Kusumastuti.

Tim Pranatan Lampah-Lampah Dhaup Ageng, Nyi Mas Tumenggung Sestrorukmi, menjelaskan beksan itu mencerminkan dua insan yang berjanji untuk bersatu dalam ikatan perkawinan dengan harapan kelak hidup rukun dan bahagia. “*Sidamukti*

memiliki arti terwujud, tercukupi segalanya, dan bahagia.”

Bedhaya Sidamukti merupakan satu dari dua tarian yang dapat disaksikan para tamu undangan Dhaup Ageng dalam sesi Pahargyan. Selain itu, para tamu disuguhi beksan *Bedhaya Kakung Indra Widagda*.

Beksan diperagakan oleh tujuh penari putra. Beksan mengisahkan tentang Bathara Indra, seorang tokoh dalam teks *Asthabrata* versi Pakualaman yang mengutamakan pendidikan bagi keluarga dan masyarakat. *Indra widagda*, ‘Indra yang pandai’.

Selanjutnya, pengantin

melaksanakan Tampa Kaya yang melambangkan tanggung jawab penuh seorang suami dalam menafkahi lahir batin istri. Dalam upacara itu, pengantin laki-laki mengucurkan 27 biji-bijian, empon-empon, *dingo bengle*, uang logam, dan bunga *sri taman* yang diterimakan kepada pengantin perempuan secara hati-hati agar tidak tumpah.

“Makna simbolis upacara ini adalah mengingatkan pengantin akan pentingnya benih dan tempat persemaiannya agar menghasilkan tanaman yang subur dan bermanfaat,” papar dia.

Sementara itu, makna filosofisnya ialah dengan suci hati pengantin laki-laki dan perempuan melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai peran dan potensi yang dimiliki.

Sebelumnya, beberapa upacara juga sudah dijalani kedua mempelai, yaitu dari ijab atau akad nikah. Selanjutnya, kedua mempelai melakukan acara Panggih, prosesi pertemuan pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan setelah upacara ijab serta sungkeman, pengantin memohon doa restu kepada orangtua agar selamat, bahagia, dan sejahtera dalam menempuh kehidupan berumah tangga.

Salah satu pengembangan dari Dhaup Ageng itu ialah Permaisuri KGPAА Paku Alam X, GKBRAA Paku Alam (Gusti Putri), khusus membuat 11 varian motif batik *Indra widagda*. Motif batik *Indra widagda* atau Indra yang pandai itu diciptakan berdasarkan iluminasi Bathara Indra dalam naskah *Sestradisuhul dan Sestra Ageng Adidarma*.

“Wastra batik tersebut merupakan representasi dari tema Dhaup Ageng, *Manifestasi* kecerdasan Bathara Indra, yang pembuatannya memakan waktu setidaknya dua tahun,” papar Gusti Putri yang juga seorang pembatik. (Ardi Teristi/N-1)

Keppres BPIH sudah Diteken Presiden

Pelaksanaan musim haji 1445 H/2024 M harus lebih baik jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Apalagi, Indonesia mendapat tambahan kuota sekitar 20 ribu.

M IQBAL AL MACHMUDI
m.iqbal@mediaindonesia.com

PEMERINTAH telah mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji (bipih) dan nilai manfaat. Dari keppres tersebut biaya perjalanan jemaah yang berangkat dari embarkasi Surabaya lebih besar, yakni Rp97.890.448 dibanding embarkasi lainnya, sedangkan BPIH terendah ada di embarkasi Aceh sebesar Rp87.359.984.

"Setiap embarkasi berbeda karena jarak tempuh yang berbeda. Ibaratnya kalau kita umrah harga tiket perjalanannya pun berbeda setiap daerah dan jarak tempuhnya berbeda sehingga makin ke ujung semakin mahal," kata Ketua Tim Advance Mitigasi Sistem Umroh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Azhar Ghazali, saat dihubungi, kemarin.

Perbedaan besaran BPIH tersebut berkonsekuensi pada besaran bipih pada setiap embarkasi. Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.526.334 dan embarkasi Aceh Rp49.995.870.

Besaran bipih ini dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, akomodasi Mekah, sebagian biaya akomodasi

Madinah, biaya hidup, dan visa.

Keppres juga mengatur besaran BPIH tahun 1445 H/2024 M yang bersumber dari nilai manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran bipih sebesar Rp8.200.040.638.567. Adapun nilai manfaat untuk jemaah haji khusus sebesar Rp14.558.658.000.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa biaya haji 1445 H/2024 M sebesar Rp93,4 juta. Pada tahun ini jumlah jemaah haji Indonesia mencapai 241 ribu jemaah setelah pemerintah Arab Saudi menambah kuota 20 ribu.

Pada kesempatan berbeda Menteri Agama Yaqut Cholli Qoumas meminta layanan haji disiapkan secara detail dan berorientasi pada jemaah.

"Saya minta, dalam menyiapkan layanan haji ini harus detail. Perhatikan semua hal, jangan sampai ada yang terlewat," kata Yaqut melalui keterangannya kemarin.

Ia menekankan, sesuai pesan Presiden Jokowi penyelenggaraan haji tahun ini harus menjadi yang terbaik. Tema yang diusung, yakni Haji Ramah Lansia. "Cara pandang kita dalam menyiapkan layanan ini ialah kepada jemaah, bukan pada hal lainnya. Ini harus dicamkan. Setiap layanan yang diberikan, harus dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi jemaah dalam melaksanakan ibadah

haji," ujar dia.

Sebelumnya Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Waleed Abdulkarim, menyebut pemerintah Arab Saudi akan berupaya memperbaiki sistem dan pelayanan ibadah haji sehingga jemaah dapat terlayani dengan baik.

Kerja sama

Juru bicara Kementerian Agama Anna Hasbie menambahkan untuk optimalisasi layanan jemaah Kementerian Agama akan bekerja sama dengan syarikah penyedia akomodasi haji 1445 H/2024 M. Ada beberapa syarikat yang hendak dijadikan partner dan saat ini masih dalam negosiasi.

"Proses itu Insyaa Allah Januari rampung karena ibadah haji dilaksanakan pada Mei agar bisa menyiapkan yang lainnya. Ini sudah masuk *timeline* kami dipikirkan memang di Januari ini kita sudah ada kerja sama," ujarnya.

Terkait pemondokan, dijelaskan, selama ini lokasi jemaah sekitar 4 kilometer dari Masjidil Haram sehingga tidak masalah. Untuk di Mina tahun ini targetnya ingin lebih dekat lagi ke tempat jamarah.

"Jadi, lokasi ini setelah kita lihat memang harus diadakan kontrak seperti *booking* tempat, semakin cepat semakin baik. Kita sudah memilih ada beberapa tempat," kata Anna, kemarin. (H-1)

Biaya Haji 2024 Ditetapkan

Biaya haji tahun 2024 untuk setiap embarkasi telah ditentukan. Biaya tertinggi tercatat di embarkasi Surabaya dan terendah di Aceh.

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah telah menetapkan nominal biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi untuk setiap embarkasi atau tempat pemberangkatan. Biaya haji tertinggi tercatat di embarkasi Surabaya dan terendah di Aceh.

Penetapan biaya haji 2024 tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024 yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat yang ditetapkan pada 9 Januari 2024. Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, petugas haji daerah (PHD), serta pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIBHU).

Dalam keppres tersebut tercantum besaran nominal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPH) dan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) di 14 embarkasi. Embarkasi tersebut meliputi Aceh, Medan, Batam, Padang, Palembang, Jakarta (Pondok Gede), Jakarta (Bekasi), Su-

rakarta, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Lombok, dan kertajati.

Nominal biaya haji tertinggi tercatat di embarkasi Surabaya dengan Bipih sebesar Rp 605 juta. Sementara nominal biaya haji terendah tercatat di embarkasi Aceh dengan Bipih sebesar Rp 499 juta. Adapun biaya di embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) masing-masing ditetapkan Rp 58,4 juta.

Besaran Bipih di semua embarkasi tahun ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena terdapat penyesuaian biaya. Bipih ini digunakan untuk biaya berbagai keperluan jemaah, seperti penerbangan haji, akomodasi di Mekkah, sebagian biaya akomodasi di Madinah, biaya hidup, dan visa.

Sementara nominal Bipih PHD dan pembimbing KBIBHU tertinggi juga tercatat di embarkasi Surabaya sebesar Rp 97,8 juta dan terendah di Aceh, yakni Rp 87,3 juta. Biaya di embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) ditetapkan se-

besar Rp 95,8 juta.

Bipih PHD dan KBIBHU ini digunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, serta pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Biaya ini juga untuk perlindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, keimigrasian, premi asuransi, dan perlindungan lainnya. Selain itu juga untuk ongkos dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jemaah haji di Tanah Air dan Arab Saudi, pelayanan umum, dan pengelolaan BPH.

Juru Bicara Kementerian Agama (Kemena) Anna Hasbie dalam rilis, Kamis (11/1/2024), mengatakan, jemaah reguler yang namanya tercantum dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) agar menyiapkan proses pelunasan biaya haji melalui bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS-BPH).

Pelunasan Bipih jemaah haji reguler tahap pertama dibuka mulai 10 Januari hingga 12 Februari 2024. Pelunasan tahap

pertama dapat dilakukan jemaah haji reguler yang memenuhi sejumlah kriteria, seperti sesuai nomor urut porsi keberangkatan dan masuk prioritas lanjut usia. Pelunasan juga bisa dilakukan untuk jemaah haji reguler yang masuk dalam urutan nomor porsi cadangan.

Selain melunasi biaya haji, Anna juga mengimbau jemaah untuk mempersiapkan kemampuan fisik atau *istitah* kesehatan. Tahun ini, Kemena menjadikan *istitah* kesehatan sebagai syarat wajib agar jemaah lebih optimal dalam menjalankan ibadah haji di Tanah Suci, sekaligus mengurangi potensi jemaah yang wafat karena kurangnya persiapan fisik.

Selanjutnya, Menteri Agama Yaquut Cholli Quroumas merinci dana nilai manfaat keuangan jemaah haji reguler sebanyak 219.463 orang mencapai Rp 8,2 triliun. Sementara dana nilai manfaat bagi haji khusus sebanyak 19.280 orang tercatat Rp 14,5 miliar. Dengan jumlah tersebut, pembebanan nilai manfaat untuk jemaah haji khusus

yakni nilai Rp 755.000 per orang.

"Akan sangat memberatkan jika jemaah haji harus membayar sekaligus biaya pelunasan haji. Oleh karena itu, ke depan skema baru dalam pelunasan BPH harus mulai diterapkan, yaitu calon jemaah haji bisa melakukan pelunasan ongkos haji dengan cara mencicil atau angsuran sehingga sisa biaya haji yang dilunasi tidak terasa lebih banyak," tuturnya.

Selanjutnya, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan kuota haji Indonesia tahun ini sebanyak 241.000 jemaah. Jumlah ini terdiri dari 221.000 kuota normal dan 20.000 kuota tambahan. Kuota ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 229.000 anggota jemaah.

Kemena telah merilis daftar nama jemaah haji reguler yang masuk alokasi kuota tahun 1445 H/2024 M. Daftar nama ini sudah diumumkan dan dikirim ke Kantor Wilayah Kemena Provinsi seluruh Indonesia.

(MTK)

3 Warisan Budaya Tunggu Sidang UNESCO 2024

Penetapan warisan dunia bukan sebatas pencatatan administrasi, tetapi juga menjadi usaha bersama melestarikan dan menjaganya.

DEVI HARAHAP
devi@mediaindonesia.com

INDONESIA mendorong identifikasi, perlindungan, serta pelestarian warisan budaya dan alam yang dianggap memiliki nilai luar biasa bagi kema-

nusiaan secara global. Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) Itje Chodidjah mengatakan pihaknya mendaftarkan beberapa situs warisan budaya dan situs alam Indonesia sebagai warisan dunia yang sudah didaftarkan dan akan segera disahkan pada 2024.

"Saat ini ada dua *geopark* nasional yaitu Geopark Kebumen dan Geopark Meratus yang didaftarkan Indonesia kepada UNESCO pada 2023 ini sedang menunggu masa sidang 2024 untuk segera disahkan. Selain itu, ada kebaya, reog ponorogo sebagai *sofguarding*, dan jamu sebagai *representatif place* dan warisan budaya tak benda yang sudah didaftar," ujar Itje kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Itje menjelaskan, tahun ini belum ada daftar warisan budaya dan alam yang didaftarkan. Proses pendataan warisan yang akan didaftarkan tahun ini masih didata pemerintah daerah untuk kemudian ditindaklanjuti oleh KNIU.

"Untuk *cycle 2024*, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) belum menerima pencalonan dari Komite Nasional Geopark Indonesia," jelasnya.

Menurut Itje, penetapan warisan dunia tersebut bukan sebatas pencatatan administrasi, tetapi juga menjadi usaha bersama untuk wajib melestarikan dan menjaganya. Dikatakan bahwa tak ada satu pun individu atau lembaga yang dapat mengubahnya.

"Tetapi yang sering terjadi di lapangan justru penda maupun kementerian/lembaga punya kepentingan lain. Mereka sering kali tidak menginformasikan tentang situs dan kewajiban menjaga situs. Akhirnya terjadi miskonsepsi. Mereka berkata 'Ini daerah kami, kenapa mau membangun tidak boleh', hal seperti ini yang menjadi pekerjaan rumah bersama. Ada kewajiban untuk menjaga warisan dunia," ungkapnya.

Ancaman

Budayawan senior Taufik Rahzen mengatakan fenomena lonjakan wisatawan menjadi ancaman serius situs warisan dunia di Indonesia. Karena itu, pengembangan pariwisata jangan hanya bersifat antroposentris

semata yang mengeser nilai ekonomi, tetapi juga mesti mempertimbangkan aspek ekosentris yang mengedepankan pelestarian ekosistem.

"Harus ada konvensi untuk standar pengaturan warisan budaya yang dijadikan tempat wisata. Misalnya dibuat kawasan inti dan pengembangan, biasanya bagian ini yang dimanfaatkan oleh pariwisata. Seharusnya para perencanaan dan pengambilan keputusan di bidang konservasi dan pariwisata mengetahui tentang hal ini," ujarnya.

"Kebijakan yang melewati daya dukung lingkungan seharusnya ada semacam *cultural observatory*, para ahli multidisiplin sebagai struktur antara (*intermediate structure*) yang memperantarai berbagai kepentingan," ujarnya. (H-2)

■ TABUNGAN HAJI

Bank Bidik Dana Tabungan Haji Naik

JAKARTA. Pemerintah telah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2024 sebesar Rp 93,4 juta. Dari jumlah ini, biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jemaah rata-rata sebesar Rp 56,04 juta. Selebihnya ditanggung oleh nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

BPKH memprediksi dana kelolaan haji tahun ini bisa naik dari tahun lalu. Pada 2023, BPKH mencatat, total dana kelolaan haji mencapai Rp 167 triliun.

Dari total dana tersebut, sebanyak 75% porsi dana ditempatkan di instrumen investasi, yakni Rp 126 triliun. Sisanya ditempatkan di perbankan senilai Rp 41 triliun. "Bank penerima setoran (BPS) BPIH jadi ujung tombak mengajak masyarakat menabung dana haji," ungkap Indra Gunawan, Anggota Badan Pengurus BPKH, Selasa (16/1).

Seiring itu, sejumlah bank pengelola tabungan haji pun optimistis dana kelolaan tabungan naik. Misalnya unit usaha syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah). "Kami menargetkan pertumbuhan pendaftaran haji pada 2024 naik 30% dibandingkan 2023," kata Pandji P. Djanegara, Direktur Syariah Banking CIMB Niaga.

Pandji bilang, pada 2023 ada sekitar 46.000 nasabah telah membuka rekening tabungan haji di CIMB Niaga Syariah.

Dus, dana himpunan tabungan haji di CIMB Niaga Syariah mencapai Rp 4,6 triliun per Desember 2023, dengan total pendaftar 201.000 jemaah.

Untuk memperluas akses calon nasabah, CIMB Niaga Syariah akan mengoptimalkan kapabilitas OCTO Clicks. Salah satunya dengan memberi kemudahan membuka rekening dan pendaftaran haji melalui *internet banking*.

Bank Muamalat juga opti-

Bank penerima setoran BPIH jadi ujung tombak untuk ajak masyarakat tabung dana haji.

mistis tabungan haji tahun ini tumbuh 15% secara tahunan. Untuk itu, bank ini akan gear meluncurkan variasi produk. Salah satunya meluncurkan tabungan haji dalam bentuk mata uang rupiah dan dollar Amerika Serikat.

Selain itu, Muamalat bekerjasama dengan Pos Indonesia yang memiliki lebih dari 4.000 jaringan kantor. "Dengan berbagai inisiatif kami optimistis tabungan haji naik 15% tahun ini," kata Dedy Suryadi Dharmawan, *SEVP Retail Banking* Bank Muamalat.

Nurtiandriyani Simamora

Climate finance: Stretching the limits of Islamic finance

Islamic finance is at the crossroads of climate interchange. To put it into context, while enjoying constant growth and with a market size already amounting to US\$3 trillion globally (ADB, 2022), the majority of large global Islamic financial institutions benefit from the fossil economy. On the other hand, the world is going in a completely different direction with businesses focused on environmental, social and governance (ESG) issues.

The home countries of the four largest global Islamic banks, Al Rajhi of Saudi Arabia, Dubai Islamic Bank, NBD Emirates and Kuwait Finance House are oil-rich economies. These financial institutions directly or indirectly rely on oil revenues for their business growth.

Similarly, Islamic financial institutions in Indonesia are also exposed to fossil-based economic activities, although on a much smaller scale. The portfolio of Islamic banks in the mining and energy sector is limited.

For instance, Islamic banking financing in the mining sector was only Rp 9.11 trillion (\$587 million) in 2022, while national banks extended up to Rp 237.39 trillion to the mining sector, which is dominated by coal.

The UAE Consensus, one of the outcomes of the Conference of Parties or COP28 meeting in Dubai, United Arab Emirates (UAE), urges the private sector, particularly financial institutions, to play a greater role in climate finance.

It emphasizes that financial support for climate action should become more available, accessible and affordable, and ensure climate investment is seen as an



By **Luqyan Tamanni**
and **Ikram Nur Muharam**
Jakarta

Luqyan Tamanni is head of BSI Institute, Bank Syariah Indonesia. Ikram Nur Muharam is senior research fellow, BSI Institute. The views expressed are their own.

economic opportunity.

One such opportunity is in energy transition financing, which is critical in cutting carbon emissions to zero, particularly by maintaining global temperatures at the current level. Participating countries have set out their zero-carbon emissions targets. Indonesia, for instance, has a zero-emissions target to be achieved by 2060.

tries with a lower elevation, such as Maldives with an average elevation of 1.5 meters, will be at higher risk.

If such a situation happens, the impact will also be worse for Indonesia, which, according to one study (Hooijer & Vermimmen, 2021), has the largest extent of land below 2 m above mean sea level.

In this regard, we should ask

Formulating a joint general guidance and clear climate financing-related taxonomy is necessary, where financial institutions from different countries can agree on general targets while still providing room for local context adjustments.

With such ambitious goals, countries must galvanize all available resources. While developed countries may pledge to support developing countries with aid programs, domestic resources within developing countries must also be optimized.

The cost of inaction is just too much. One estimate suggests that if countries do not get their act together, by the year 2100, the sea level could rise by 130 centimeters.

This predicted rise will drastically submerge many coastal areas around the planet. Coun-

terparts: Where do we stand in this climate emergency?

Islamic financial institutions have all of the good reasons to take sides with the climate change-mitigation agenda.

Not only are the values imbedded in Islamic finance similar to the climate agenda, i.e. environmental protection and preservation, the economic values to be generated from climate financing or ESG investing are too significant to be ignored.

According to the UN Climate Change Conference report for COP28 meetings, the financing

gap to meet Paris Agreement's target of capping temperature increase by 1.5 degrees is about \$41 trillion. Multilateral development banks (MDBs), governments of the developed countries and private sector companies have pledged about half of this.

Indeed, there are opportunities for Islamic financial institutions to support global warming initiatives.

However, there are challenges to stretch the limits of Islamic finance regarding climate financing.

In the Gulf Cooperation Council (GCC) countries, Islamic finance has been relying heavily on oil and gas revenues-related business for so long. Cutting such a long-standing dependency is daunting, if not nearly impossible.

Meanwhile, banks in Southeast Asia still need palm oil and coal companies to grow their business portfolio.

Moreover, due to their comparatively small size, most financial institutions in this area still prioritize consumer financing.

Furthermore, the Unlocking Islamic Climate Finance report (ADB, 2022) and Mobilizing Islamic Banking for Climate Action report (UN & IsDB, 2023) mentioned the complexity of various governance structures and standards, which are exacerbated by the absence of common taxonomy classification. The existence of sharia-compliance issues makes Islamic green financing more complicated than its conventional counterpart.

What can we do about these challenges?

First, Islamic financial institutions need to diversify a large portion of their portfolios and significantly reduce exposure to

fossil fuel-related assets. Islamic banks in particular, especially from the GCC countries may consider lowering their exposure to oil and gas, while those in Southeast Asia should diversify away from coal or palm oil. This could take years to materialize, but it is a worthwhile journey.

Second, collaboration is inevitable and Islamic financial institutions should take the lead in this initiative.

Formulating a joint general guidance and clear climate financing-related taxonomy is necessary, where financial institutions from different countries can agree on general targets while still providing room for local context adjustments.

Stakeholder collaboration will induce sharia-compliant green financing products and green ecosystems.

And finally, raising awareness about climate risks is a matter of necessity. In addition to encouraging stakeholders' participation and engagement on climate finance issues, Islamic banks also need to develop a credible pool of sustainable talent.

Clearly, climate-related financing generally involves advanced projects that require an extensive understanding of risk and opportunities.

With these actions put together, we hope that the existing capacities and resources in the Islamic finance space could be extended, and stretched to their limits. Without such an aggressive push and pressure, Islamic financial institutions will only continue their business as usual.

And this is catastrophically wrong. It is time we get our act together, now.

Baru Ada 4.438 Jemaah Haji Tahun ini sudah Lunasi Bipih

PELUNASAN biaya perjalanan ibadah haji (bipih) 1445 H/2024 M sudah dibuka sejak 10 Januari 2024. Tahap itu akan berlangsung hingga 12 Februari 2024. Kementerian Agama menyebut bahwa sejauh ini baru ada 4.438 jemaah yang melunasi bipih.

"Sampai 15 Januari atau hari keempat pelunasan, ada 4.438 jemaah yang telah melunasi bipih," ungkap juru bicara Kemenag Anna Hasbie, kemarin.

Menurut Anna, dalam empat hari ini ada kenaikan tren pelunasan bipih yang dilakukan jemaah haji. Pada hari pertama, ada 147 jemaah yang melunasi, lalu 709 pada hari kedua, 986 pada hari ketiga, dan 2.596 pada hari keempat.

"Saya berharap akan terus meningkat pada hari ke depan hingga akhir tahap pelunasan, seiring dengan semakin banyaknya jemaah yang telah melakukan pemeriksaan dan memenuhi syarat *istitha'ah*," sebut Anna.

Untuk diketahui, pelunasan bipih tahun ini harus terlebih dahulu memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan bagi jemaah yang masuk alokasi kuota keberangkatan. Indonesia mendapat kuota sebanyak 241.000 jemaah terdiri atas jemaah haji reguler dan haji khusus. (Des/H-1)

Kuota Haji Indonesia Berpotensi Naik 2 Kali Lipat

INDONESIA berpotensi mendapat kenaikan kuota haji hingga dua kali lipat pada 2030. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyebutkan potensi kenaikan tersebut didorong Visi Saudi 2030 yang berupaya meningkatkan jumlah jemaah hajinya.

“Jadi kalau kita lihat dari sisi Saudi 2030, jemaah haji diprediksi akan meningkat menjadi 4,5 juta pada 2030, ini akan berakibat pada peningkatan kuota di seluruh negara termasuk Indonesia,” ujarnya kepada wartawan seusai pertemuan perwakilan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kediaman resmi Wapres, kemarin.

Fadhul menjelaskan pada 2024 Indonesia mendapat kuota sebanyak 220 ribu dan tambahan hingga 20 ribu seusai hasil diplomasi Presiden Joko Widodo dalam

kunjungan kenegaraannya lalu. Ia menyebutkan dengan adanya asumsi kenaikan lebih dari dua kali lipat, otomatis kuota haji untuk Indonesia juga akan meningkat lebih dari 2 kali sehingga akan menjadi tantangan yang harus segera mendapatkan solusi dari pemerintah.

“Ini menjadi tantangan, kenapa? Karena nilai manfaat yang kami harus disediakan itu pasti akan meningkat lebih banyak dan otomatis dua kali lipat dari apa yang selama ini kami bayarkan,” ucapnya.

Dia mengatakan apabila berbicara dari sisi nilai manfaat, tentu saja kenaikan kuota haji akan beririsan dengan fungsi dari dana kelolaan yang harus digenjut semaksimal mungkin agar mendapat manfaat serta seoptimal mungkin untuk ditujukan kepada jemaah haji. “Ini tantangannya,” jelasnya.

Pada kesempatan terpisah,

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Abdullah AR melalui *Media Indonesia* menyampaikan kepada seluruh jemaah calon haji reguler Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, agar segera melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahap pertama 2024.

Waktu pelunasannya mulai 10 Januari hingga 12 Februari 2024. Jemaah juga diimbau mempersiapkan diri lebih matang, misalnya mengutamakan kebugaran dan senantiasa menjaga kesehatan karena aktivitas ibadah haji membutuhkan ketahanan fisik.

“Lama sudah merindukan dan menunggu jadwal haji reguler. Sekarang baru tiba saatnya giliran kuota keberangkatan. Maka segeralah melunasi biaya perjalanan setelah memastikan kesehatan mengizinkan,” tutur Abdullah AR. (Che/MR/H-2)

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1445 H pada 11 Maret

PIMPINAN Pusat Muhammadiyah menetapkan awal atau 1 Ramadan 1445 Hijriah/2024 Masehi jatuh pada Senin, 11 Maret 2024, berdasarkan hisab hakiki (*wujudul hilal*) yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. "Di wilayah Indonesia, 1 Ramadan 1445 H jatuh pada Senin Pahing, 11 Maret 2024 Masehi," demikian bunyi surat Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang diterima di Jakarta, kemarin.

Surat tersebut ditandatangani Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Hamim Ilyas dan Atang Solihin. PP Muhammadiyah memandangi pada Ahad, 29 Syakban 1445 H, bertepatan dengan 10 Maret 2024, ijtima' menjelang Ramadan 1445 H terjadi pada pukul 16:07:42 WIB. Selain menentukan 1 Ramadan 1445 H, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga telah menetapkan 1 Syawal 1445 H dan 1 Zulhijah 1445 H.

Untuk 1 Syawal 1445 H/Idul Fitri 2024, pada Senin, 29 Ramadan 1445 H, yang bertepatan dengan 8 April 2024, ijtima' jelang Syawal 1445 H terjadi pada Selasa, 30 Ramadan 1445 H, bertepatan dengan 9 April 2024, pukul 01:23:10 WIB. 'Di wilayah Indonesia, 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada Rabu Pahing, 10 April 2024 Masehi', tulis surat tersebut. (Ant/H-3)



**UNTUK MENCARI KLIPING
LAINNYA DAPAT MENKSES
LINK BERIKUT**



bit.ly/KlipingDigitalUINRF



atau scan di sini

